



SUBSTANSI

SUMBER ARTIKEL AKUNTANSI AUDITING DAN KEUANGAN

Substansi
ISSN: 2598-0106 (print)
ISSN: 2620-9853 (online)

Artikel 4

Volume 8, Number 2,
Year 2024

23-12-2024

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PULAU JAWA

Sukarno*

Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Indrayansyah Nur

Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Budi Susilo

Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

**Penulis Koresponden: anow@pknstan.ac.id*

Submitted:
15-11-2024

Revised:
28-11-2024

Accepted:
30-12-2024

Citation:

Sukarno, Nur, I., & Susilo, B. Analisis Dampak Program Dana Desa dan Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Pulau Jawa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 8(2) hal 38-49. <https://doi.org/10.31092/subs.v8i2>.

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/3080>



Artikel ini diterbitkan secara gratis dan terbuka oleh Program Diploma III Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN. Naskah ini telah diterima untuk dimasukkan ke dalam Jurnal Substansi: Sumber Akuntansi, Auditing, dan Keuangan oleh Tim Editor resmi jurnal.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PULAU JAWA

Sukarno

Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Indrayansyah Nur

Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Budi Susilo

Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

**Penulis Koresponden: anow@pknstan.ac.id*

Abstact:

Research objective: This research aims to analyze the factors that influence poverty on the island of Java, as well as formulate recommendations for programs and activities for the revitalization of the rural economy.

Method: This research was conducted using the quantitative method through panel data regression analysis from secondary data.

Research findings: The research finds that each of Village Funds, Provincial Minimum Wages, GRDP, and HDI has a significant influence on poverty in each province on the island of Java. The GRDP variable makes the greatest contribution to reducing poverty, but the Minimum Wage variable negatively affects poverty.

Practical implication: The large GDP contribution shows that the results of development in the economic sector in sufficient and appropriate amounts are very important. Therefore, the government is expected to be able to encourage the realization of an increase in GRDP.

Keywords: village program, poverty, GRDP

Abstrak:

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pulau Jawa, serta merumuskan rekomendasi program dan kegiatan untuk revitalisasi perekonomian pedesaan.

Metode: Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif melalui analisis regresi data panel dari data sekunder.

Temuan penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa masing-masing Dana Desa, Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada setiap provinsi di pulau Jawa. Variabel PDRB memberikan kontribusi paling besar dalam pengentasan kemiskinan, namun variabel Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Implikasi praktis: Besarnya kontribusi PDB menunjukkan bahwa hasil pembangunan di bidang perekonomian dalam jumlah yang cukup dan tepat sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu mendorong realisasi peningkatan PDRB.

Kata Kunci: program desa, kemiskinan, PDRB

PENDAHULUAN

Pemerintah Pada awal tahun 2020, pemerintah mengumumkan bahwa perekonomian Indonesia menduduki peringkat ke-16 dunia jika diukur dari produk domestik bruto (PDB). Peringkat ini diperkirakan akan semakin meningkat, dengan Indonesia diperkirakan berada di peringkat keempat dunia pada tahun 2050, di belakang Tiongkok, India, dan Jepang. Namun hal ini masih belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat karena indikator PDB hanya menunjukkan besarnya “kue” perekonomian dan bukan merupakan indikator kesejahteraan. Jika kita melihat tingkat kemiskinan dan pengangguran, masalahnya masih serius. Penduduk Indonesia miskin sebesar 9,6 persen dan tingkat pengangguran sebesar 5,34 persen. Oleh karena itu, persoalan kesetaraan masih terus terjadi di Indonesia, khususnya di pedesaan. Ingatlah bahwa 82% wilayah Indonesia adalah pedesaan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan terhadap pembangunan pedesaan baik di bidang infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

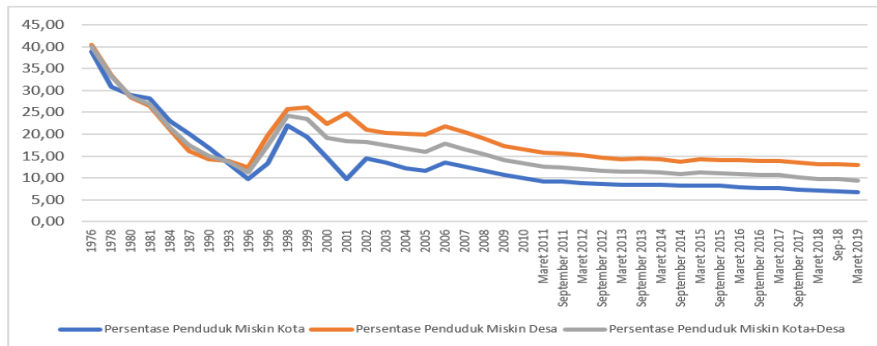
Menurut data Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki 514 kabupaten dan kota. Ini terdiri dari 416 distrik dan 98 kota. Di sisi lain, jumlah desa adalah 74.957 desa dan 8.430 desa. Artinya sebagian besar wilayah pembangunan Indonesia berada di pedesaan. Jumlah desa yang belum berkembang sebanyak 122 desa. Ini adalah masalah bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan PDB terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Tingkat yang buruk bervariasi tergantung pada daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 25,95 juta jiwa (9,82 persen), sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 25,14 juta jiwa (9,41 persen). Jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun perkotaan semakin berkurang. Terdapat 9,99 juta penduduk miskin perkotaan dan 15,15 juta penduduk miskin pedesaan.

Menurut sumber BPS, fenomena tingginya angka kemiskinan di pedesaan dibandingkan perkotaan selalu terlihat sejak tahun 1993. Pada saat itu, orang miskin di populasi pedesaan adalah 13,8 dalam populasi dan 13,4 % di daerah perkotaan. Kesenjangan tahun depan meningkat pada 2017. Rasio desa -desa yang buruk mencapai 13,47 %, dan rasio populasi miskin di kota itu adalah 7,26 %. Fenomena ini tetap sama selama program pinjaman pedesaan. Kesenjangan antara kemiskinan di pedesaan dan perkotaan semakin melebar dari 5,92 persen pada bulan Maret 2015 menjadi 6,16 persen pada bulan Maret 2019.

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, namun mengingat Indonesia mempunyai jumlah penduduk miskin yang besar, kesejahteraan belum tercapai. Tingkat kemiskinan berbeda antara daerah pedesaan dan perkotaan. Pada tahun 2018, populasi yang buruk berjumlah 25,95 juta atau 9,82 persen, sedangkan pada tahun 2019 adalah 25,14 juta atau 9,41 persen. Populasi miskin yang tinggal di kota adalah 9,99 juta, sementara populasi miskin tinggal di desa hingga 15,15 juta orang. Menurut sumber BPS, fenomena tingginya angka kemiskinan di pedesaan dibandingkan perkotaan terus diamati sejak tahun 1993. Saat itu, proporsi penduduk miskin di pedesaan sebesar 13,8 persen dari jumlah penduduk, dan di perkotaan sebesar 13,4 persen. Pada tahun berikutnya, kesenjangan tersebut semakin melebar, dan pada tahun 2017, proporsi penduduk miskin di pedesaan sebesar 13,47 persen, dan proporsi penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,26 persen.

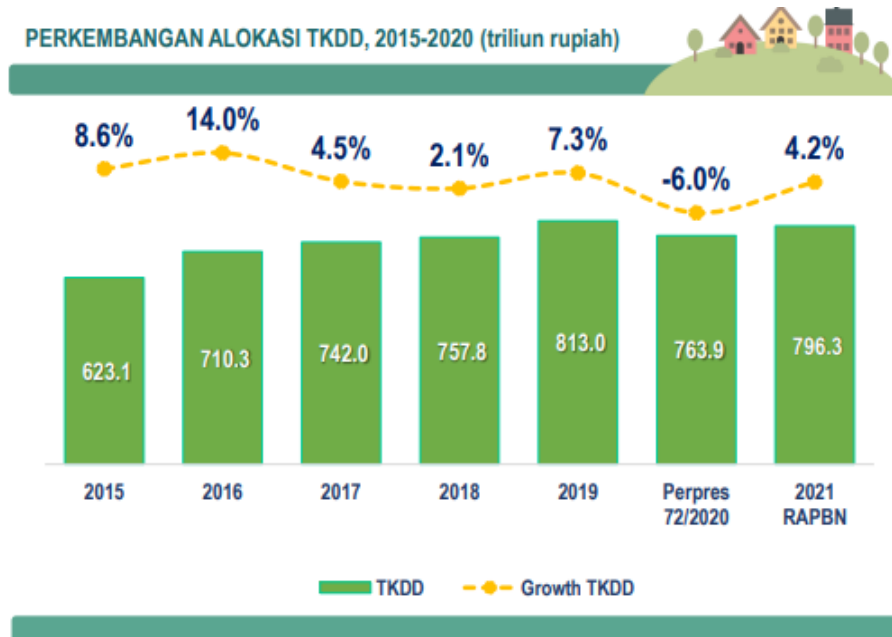
Pada awal tahun 2020, pemerintah mengumumkan perekonomian Indonesia yang diukur dari produk domestik bruto (PDB) menempati peringkat ke-16 dunia. Namun hal ini belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat, karena indikator PDB hanya menunjukkan besarnya “kue” perekonomian dan bukan indikator kesejahteraan. Kalau dilihat dari tingkat kemiskinan, permasalahan kita masih besar yakni 9,6 persen penduduk Indonesia tergolong miskin.

Gambar 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Desa dan Kota di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Alokasi Dana Desa tiap tahun selalu naik, Pada tahun 2021 TKDD yang disalurkan pemerintah Pusat ke Daerah sejumlah 796,3 T



Adapun rumusan masalah dalam penelitian analisis dampak program dana desa dan faktor yang mempengaruhi kemiskinan di pulau Jawa adalah bagaimana dampak dana desa terhadap tingkat kemiskinan di pulau Jawa selama tahun 2015-2020? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di pulau Jawa selama tahun 2015-2020? Dan bagaimana merumuskan rekomendasi untuk mengurangi kemiskinan di Pulau Jawa selama 2015-2020?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di pulau Jawa selama 2015-2020, faktor factor apa yang berpengaruh terhadap kemiskinan di pulau Jawa selama 2015-2020, bagaimana merumuskan rekomendasi untuk mengurangi kemiskinan di Pulau Jawa selama 2015-2020

Penelitian dilakukan dalam ruang lingkup skala regional pada provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa selain DKI Jakarta antara tahun 2015-2020. Data yang digunakan

adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan berbagai literatur, baik dari internet maupun dari sumber-sumber lainnya.

Beberapa akademisi telah melakukan riset yang berhubungan dengan dana desa dan kemiskinan dengan pendekatan propinsi atau kabupaten. Tim peneliti melihat ada perbedaan yang cukup tajam kemiskinan dan dana desa antar pulau yang ada di Indonesia khususnya Indonesia Timur. Sejalan dengan bertambahnya desa, terjadi peningkatan status desa mandiri dan berkembang serta berkurangnya status desa tertinggal. Pada tahun 2014, jumlah desa tertinggal sebesar 19.750 desa (27 persen), berkurang 11 persen menjadi 13.232 desa di 2018. Sementara itu, desa berkembang bertambah dari 51.026 desa (69 persen) pada 2014 menjadi 54.879 desa (74 persen) pada 2018, sedangkan status desa mandiri bertambah dari 2.894 desa (4 persen) di 2014 menjadi 5.559 desa (8 persen) di tahun 2018.

Selain peningkatan status desa, juga diikuti perbaikan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang meningkat 0,65 poin dari 55,71 (tahun 2014) menjadi 56,36 (tahun 2018). IPD kategori desa berkembang sebesar 59,36 dengan komponen standar pelayanan minimum pemerintahan desa, capaian indeks tertinggi pada transportasi (77), dan indeks terendah pada infrastruktur (44,63). Dimensi perubahannya signifikan selama 2014-2018 adalah dimensi penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkat dari 61,59 menjadi 71,4, sedangkan dimensi yang mengalami perubahan terkecil adalah pelayanan dasar yang hanya meningkat 0,9 poin.

Dilihat dari aspek spasial, wilayah timur Indonesia dengan tingkat pembangunan desa masih relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah barat. Terdapat tiga pulau yang memiliki IPD di atas nasional (59,36) yakni pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara empat pulau lain berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Kalimantan (56,66), Nusa Tenggara (56,25), Maluku (52) dan Papua (32,57).

Apabila dilihat per provinsi, kawasan Indonesia Timur cenderung memiliki IPD lebih rendah. Pada 2018, provinsi dengan nilai IPD terkecil adalah Papua (34,67) dan Papua Barat (38,15). Namun, Papua mengalami kenaikan poin indeks lebih besar (naik 4,11 poin) dibandingkan kenaikan indeks provinsi Papua Barat (naik 1,42 poin). Sedangkan provinsi dengan IPD tertinggi DI Yogyakarta (73,23) dan Bali (73,32).

Secara umum semua provinsi mengalami kenaikan IPD, namun beberapa provinsi justru mengalami penurunan pada dimensi vital. Misalnya, terdapat 10 provinsi yang mengalami penurunan angka indeks dimensi Pelayanan Dasar seperti Papua, Papua Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bali dan bahkan DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan nilai IPD tertinggi. Sepanjang pengetahuan tim, riset yang mengukur Dana Desa dan Kemiskinan pulau Jawa belum banyak dilakukan sehingga menjadi *research gap* dalam penelitian ini.

Penelitian tentang dana desa cukup banyak dilakukan, (Ridhwani, 2020) meneliti tentang efektivitas dana desa di desa Ngabar kabupaten Ponorogo, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan dana desa dilakukan secara efektif. (Ridha Fahrul, 2019), meneliti tentang analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan Langsa, kota Langsa. Hasil penelitian dalam bentuk analisis kualitatif, menyimpulkan adanya efektivitas pengelola dana desa walau belum maksimal 100 persen. Selanjutnya (Fahri, 2017) meneliti tentang dana desa terhadap manajemen keuangan dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan. Simpulannya adalah, bahwa pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa berpengaruh positif. Penelitian ini mengukur faktor dominan yang mempengaruhi Kemiskinan yaitu dana desa di pulau Jawa dengan menambahkan *variable independent* yaitu PDRB, IPM, dan UMP.

TINJAUAN PUSTAKA

Zaenuddin (2015) menulis pandangan teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri atas tiga fungsi utama yaitu fungsi alokatif, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, untuk menuju sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, sehingga kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Misalnya saja mengatur variabel makroekonomi dengan menggunakan instrumen kebijakan perpajakan (*tax uniformity*).

Sementara itu, barang publik merupakan jenis barang yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Hal ini terkait adanya eksternalitas baik bersifat eksternalitas positif maupun negatif. Menurut (Zaenuddin, 2015), barang publik adalah barang yang bila dikonsumsi oleh orang tertentu tidak mengurangi konsumsi barang tersebut oleh orang lain. Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya, barang publik diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, sedangkan barang kolektif hanya dimiliki sebagian masyarakat saja.

Sukirno (2008) menyatakan bahwa pengangguran diklasifikasikan sebagai tenaga kerja, yang didefinisikan sebagai orang yang telah secara aktif menemukan pekerjaan upah tertentu, tetapi belum menerima pekerjaan. Di sisi lain, (Mulyani, 2017) mengklaim bahwa peningkatan populasi menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, menyebabkan masalah pengangguran. BPS mengelompokkan pengangguran terbuka menjadi kelompok pengangguran dan sedang mencari pekerjaan, kelompok pengangguran yang sedang bersiap untuk memulai wirausaha, dan kelompok pengangguran dan tidak sedang mencari pekerjaan. Orang yang belum dapat pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, orang yang sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran resmi dan tingkat kemiskinan saling terkait. Pengangguran terbuka mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Bali (Putra & Arka, 2016).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software statistik EViews. Data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan data dalam jangka waktu tertentu (*time series*) dan data individu (*cross-section*). Data deret waktu adalah data yang memungkinkan Anda melihat perubahan dari waktu ke waktu. Data diambil dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Data *cross section* merupakan data yang diambil dari provinsi-provinsi yang ada pada pulau Jawa pada rentang tahun tersebut.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu: Data Kemiskinan (MISK), Data Dana Desa (DD), Data Pertumbuhan ekonomi (PDRB), Data Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengumpulan data diperoleh dan diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi di Pulau Jawa. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada provinsi di Pulau Jawa, antara lain provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Tiga pendekatan yang umum digunakan saat memperkirakan menggunakan model regresi data panel: *Pool Least Squares (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*.

Uji Pemilihan Model

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p-value*) melalui *Chow test* sebesar 0.0000, sedangkan nilai probabilitas dari *Hausman test* sebesar 0.0000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata (α) sebesar 5%. Artinya, menolak hipotesis untuk menggunakan model REM dan menerima hipotesis untuk menggunakan model FEM, yang menyimpulkan bahwa metode estimasi yang sesuai untuk semua tipologi adalah FEM.

Untuk pengujian hipotesis klasik, hal ini tidak selalu diperlukan dalam analisis data panel, karena data panel dapat memberikan lebih banyak informasi, variasi, dan derajat kebebasan, sehingga meminimalkan potensi bias dalam hasil analisis. Keuntungan dari data panel berarti bahwa dampaknya dapat dideteksi dan diukur dengan lebih baik, yang tidak mungkin dilakukan dengan teknik cross-sectional atau time-series. Data panel memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati, 1992).

Uji Statistik

Berdasarkan hasil estimasi model didapatkan nilai koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0.9975. Nilai tersebut berarti bahwa 99,75% keragaman variabel bebas mampu menjelaskan variasi/keragaman variabel terikat Kemiskinan pada masing-masing provinsi di pulau Jawa selama jangka waktu penelitian, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model estimasi.

Apabila dilihat dari nilai probabilitas F-statistik yaitu sama dengan 0.0000 yang signifikan pada tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$. Nilai tersebut berarti bahwa variabel bebas yang disertakan dalam model estimasi pada tiap-tiap tipologi secara bersama-sama atau serentak mampu menjelaskan variabel terikat Kemiskinan pada masing-masing provinsi di pulau Jawa atau apabila nilai probabilitasnya dibawah nilai $\alpha = 5\%$, maka semakin cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel bebas yang digunakan adalah signifikan terhadap variabel terikat.

Hipotesis

H_0 Dana desa tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan

H_1 Dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan

H_0 Upah Minimum Propinsi tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan

H_1 Upah Minimum Propinsi Dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan

H_0 Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan

H_1 Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan

H_0 IPM tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan

H_1 IPM berpengaruh terhadap kemiskinan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data penelitian yang dianalisis, variabel dependen yang menjadi fokus adalah Kemiskinan, sedangkan variabel independen yang memengaruhinya meliputi Dana Desa (DD), Upah Minimum Propinsi (UMP), Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil dari pengolahan data menunjukkan hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan dapat dijelaskan melalui model regresi data panel sebagai berikut :

$$\text{LnY}_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

dimana:

- Y_{it} = Kemiskinan (MISK) di provinsi ke-i tahun ke-t
- X_1 = Dana Desa (DD) (tahun)
- X_2 = Upah Minimum Propinsi (UMP) (Rupiah/ tahun)
- X_3 = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (tahun)
- X_4 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (tahun)
- α_{it} = konstanta
- β_i = koefisien regresi peubah ke-i
- i = 1, 2, ..., 5 (data cross section 5 provinsi)
- t = deret waktu (data time series tahun 2015-2020)
- e_{it} = komponen Error/Galat model di waktu t untuk cross section ke-i

Interpretasi Model Pada Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan fixed effect model GLS cross-section weight, diketahui bahwa variabel yang secara signifikan mempengaruhi Kemiskinan pada masing-masing provinsi di pulau Jawa pada $\alpha = 5\%$.

$$\text{LnK} = 30,06 - 0.1522 \cdot \text{DD} + 0.7295 \cdot \text{UMP} - 1,348 \cdot \text{PDRB} - 0.3136 \cdot \text{IPM}$$

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 30,06 yang berarti jika variabel bebas lain dengan asumsi tetap/konstan maka akan mengakibatkan Kemiskinan sebesar 30,06 persen. Nilai koefisien DD sebesar -0,1522 yang berarti jika variabel bebas lain selain DD dengan asumsi tetap/konstan maka pertumbuhan DD sebesar 1 tahun akan mengakibatkan Kemiskinan sebesar 15,22 persen. Untuk nilai koefisien UMP sebesar 0.7295 yang berarti jika variabel bebas lain selain UMP dengan asumsi tetap/konstan maka pertumbuhan UMP sebesar 1 tahun akan mengakibatkan Kemiskinan sebesar 7,295 persen. Selanjutnya, untuk nilai koefisien IPM sebesar -0.3136 yang berarti jika variabel bebas lain selain IPM dengan asumsi tetap/konstan maka pertumbuhan IPM sebesar 1 tahun akan mengakibatkan Penurunan Kemiskinan sebesar 31,36 persen.

Hasil Uji dengan menggunakan eviews 12

Tabel 1. Hasil Uji Coefisient

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30,0614	10,3842	2,8949	0,0087
DD	-0,1522	0,0895	-1,7006	0,1038
UMP	0,7295	0,2917	2,5008	0,0207
PDRB	-1,3487	0,7641	-1,7650	0,0921
IPM	-0,3136	4,6388	-0,0676	0,9467

Sumber: data diolah penulis

Adapun pengaruh variabel independen kepada variabel dependen hasil uji F simultan sebagai berikut :

Weighted Statistics			
R-squared	0,9964	Mean dependent var	7,5403
Adjusted R-squared	0,9950	S.D. dependent var	0,9978
S.E. of regression	0,0705	Akaike info criterion	-2,2220
Sum squared resid	0,1045	Schwarz criterion	-1,8016
Log likelihood	42,3299	Hannan-Quinn criter.	-2,0875
F-statistic	722,7400	Durbin-Watson stat	1,0096
Prob(F-statistic)	7,42E-24		

Sumber: data diolah penulis

Hasil analisis output koefisien determinasi FEM regresi data panel diketahui nilai Adjusted R-squared sebesar 0,995003 maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersamaan sebesar 99,5 %.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan FEM, GLS *cross-section weight* sebagaimana Tabel 4, diketahui bahwa variabel yang secara signifikan mempengaruhi Kemiskinan pada masing-masing provinsi di pulau Jawa pada $\alpha = 5\%$.

$$\text{MISK Jabar} = 1,9845 - 0,1522 \cdot \text{DD} + 0,7295 \cdot \text{UMP} - 1,348 \cdot \text{PDRB} - 0,3136 \cdot \text{IPM}$$

$$\text{MISK Jateng} = 1,5744 - 0,1522 \cdot \text{DD} + 0,7295 \cdot \text{UMP} - 1,348 \cdot \text{PDRB} - 0,3136 \cdot \text{IPM}$$

$$\text{MISK DIY} = -4,0464 - 0,1522 \cdot \text{DD} + 0,7295 \cdot \text{UMP} - 1,348 \cdot \text{PDRB} - 0,3136 \cdot \text{IPM}$$

$$\text{MISK Jatim} = 2,3054 - 0,1522 \cdot \text{DD} + 0,7295 \cdot \text{UMP} - 1,348 \cdot \text{PDRB} - 0,3136 \cdot \text{IPM}$$

$$\text{MISK Banten} = -1,8181 - 0,1522 \cdot \text{DD} + 0,7295 \cdot \text{UMP} - 1,348 \cdot \text{PDRB} - 0,3136 \cdot \text{IPM}$$

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa nilai konstanta dalam rentang $-4,0464$ sampai dengan $2,3054$ yang berarti jika variabel bebas lain dengan asumsi tetap/konstan maka akan mengakibatkan Kemiskinan sebesar $1,9845$ persen untuk provinsi Jawa Barat, $1,5744$ persen untuk provinsi Jawa Tengah, $-4,0464$ persen untuk provinsi DIY dan $2,3054$ persen untuk provinsi Jawa Timur serta $-1,8181$ persen untuk provinsi Banten.

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa nilai koefisien DD sebesar -0,1522 yang berarti jika variabel bebas lain selain DD dengan asumsi tetap/konstan maka pertumbuhan DD sebesar 1 persen akan mengakibatkan Penurunan MISK sebesar 0,1522 persen. Untuk nilai koefisien UMP sebesar 0,7295 yang berarti jika variabel bebas lain selain UMP dengan asumsi tetap/konstan maka pertumbuhan UMP sebesar 1 persen akan mengakibatkan pertumbuhan MISK sebesar 0,7295 persen. Selanjutnya, untuk nilai koefisien PDRB sebesar -1,348 yang berarti jika variabel bebas lain selain PDRB dengan asumsi tetap/konstan maka pertumbuhan PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan MISK sebesar -1,348 persen dan untuk nilai koefisien IPM sebesar -0,3136 yang berarti jika variabel bebas lain selain IPM dengan asumsi tetap/konstan maka pertumbuhan IPM sebesar 1 persen akan mengakibatkan MISK sebesar -0,3136 persen.

Selama *variable* Dana Desa, Upah Minimum Propinsi, PDRB dan IPM berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan pada masing-masing provinsi di pulau Jawa. Meningkatnya Dana Desa, PDRB dan IPM mampu menurunkan kemiskinan. Namun demikian perlu kehati-hatian dalam kebijakan upah minimum. Upah minimum yang terlalu tinggi dapat mengguncang penawaran dan permintaan tenaga kerja dan dapat berakibat negatif terhadap kemiskinan. Beberapa akademisi telah melakukan riset yang berhubungan dengan Dana Desa dan Kemiskinan dengan pendekatan propinsi atau kabupaten, seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ridha Fahrul (2019), Fahri (2017), dan Ridhwani (2020).

Hasil analisis output koefisien determinasi FEM regresi data panel diketahui nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,9950, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 99,5 %.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Dana Desa, Upah Minimum Propinsi, PDRB dan IPM berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan pada masing-masing provinsi di pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi ternyata memiliki nilai $\text{sig}=0,0000$ ($\alpha<0,05$). Tingginya kontribusi PDRB menunjukkan hasil pembangunan di bidang ekonomi dengan jumlah yang cukup dan layak sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat standar ekonomi penduduk yang diantaranya tercermin dari menurunnya angka kemiskinan.

Variabel UMP berpengaruh positif terhadap kemiskinan dikarenakan upah minimum yang diatas upah equilibrium akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan disuatu daerah. Sementara untuk data IPM, selama kurun waktu penelitian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Tingginya kontribusi IPM terhadap kemiskinan karena dengan kenaikan tingkat IPM menyebabkan kemiskinan berkurang.

Namun demikian, penelitian ini masih terdapat keterbatasan diantaranya adalah tidak memasukan variabel pengangguran, dimana variabel tersebut dimungkinkan dapat mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah. Lebih lanjut, data populasi provinsi DKI Jakarta tidak dimasukkan dikarenakan wilayah tersebut tidak memiliki dana desa.

Untuk mengurangi angka kemiskinan di pulau jawa agar memprioritaskan peningkatan PDRB dibandingkan dengan peningkatan Dana Desa, IPM dan UMP. Khusus UMP perlu kehati-hatian dalam menetapkan besaran UMP, UMP yang terlalu tinggi akan berdampak

pada meningkatkan pengangguran yang akhirnya justru akan meningkatkan angka kemiskinan.

Implikasi hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan mengurangi kemiskinan di Pulau Jawa. Peningkatan PDRB akan menciptakan efek multiplier yang signifikan, seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Dana Desa sangat penting dalam menstimulus ekonomi di desa dan peningkatan IPM sangat penting bagi produktivitas. Dengan mengelola UMP secara hati-hati, angka pengangguran dapat ditekan sehingga menurunkan risiko peningkatan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, H. (2013). Economic Impact Analysis of the 2012 Indonesia Mineral-Export Tax Policy: A CGE Approach. *International Journal of Economic Policy Studies*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.1007/bf03405742>
- Badan Pusat Statistik. 2017. Tabel Input-Output Nasional 2010. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Indeks Pembangunan Desa 2018. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Departemen Keuangan. 2000. BKFDK-RI (Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia). 2008. Pengembangan Model Computable General Equilibrium: Modul Pelatihan Tahap I, Center for Economics and Development Studies (CEDS). Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik, UNIV.GARUT*, 11(1), 75–88.
- Melliana, A., & Zain, I. (2013). Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2(2), 237–242.
- Nachrowi, D., & Hardius, U. (2006). *Ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan : Pendekatan populer dan praktis*. Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Pratowo, N. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Indonesia*, 15–31.
- Ridha Fahrul. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 253–276.
- Ridhwani, I. (2020). *EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA TESIS Oleh : IWAN RIDHWANI NIM 212117020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO PASCASARJANA FEBRUARI 2020*.
- Su, L., Zhang, Y., & Wei, J. (2016). A practical test for strict exogeneity in linear panel data models with fixed effects. *Economics Letters*, 147, 27–31. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2016.08.012>

- Sukirno, Sadono. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Zaenuddin, M. (2015). *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Deepublish.
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN.
- Wittwarr, G. 1999. *WAYANG: a General Equilibrium Model Adapted for the Indonesian Economy*. Edition prepared for ACIAR Project no 9449. CIES, University of Adelaide (in association with RSPAS, ANU, CASER, Bogor, and CSIS, Jakarta).